



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

ANCAMAN AFRICAN SWINE FEVER DI INDONESIA

Masyithah Aulia Adhiem

Analisis Legislatif Ahli Pertama

masyithah.adhiem@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Singapura melaporkan adanya daging babi yang terinfeksi virus *African Swine Fever* (ASF) pada daging babi yang diimpor dari Batam, Indonesia. Pemerintah, melalui Menteri Pertanian, justru baru mengetahui kasus ASF melalui laporan otoritas Singapura tersebut. Sebenarnya, ASF sudah terdeteksi sejak awal April 2023 yang menyebabkan kematian 35.297 ekor babi di peternakan di Pulau Bulan, Batam, dan sejumlah 119.123 ekor babi terpaksa dimusnahkan untuk menghentikan penyebaran wabah. Berdasarkan data dari World Organisation for Animal Health (WOAH) yang juga disampaikan dalam laman resmi Food and Agriculture Organization (FAO), jumlah babi yang terinfeksi ASF di Pulau Bulan mencapai 285.034 ekor per 8 Mei 2023. Pemerintah masih belum menyatakan ASF sebagai wabah karena kasusnya baru merebak di satu wilayah saja. Namun, faktanya hingga saat ini diketahui bahwa ASF juga menjangkit sejumlah peternakan di wilayah lain yaitu Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dan berdampak pada 14.576 ekor babi mati yang tersebar di 11 kecamatan. Selain itu, laporan dari FAO per 10 Mei 2023 menyatakan infeksi ASF juga terjadi di wilayah lain, yaitu NTT sebanyak 455 ekor, Riau 35.297 ekor, Sulawesi Selatan 859 ekor, dan Sulawesi Tengah 2.971 ekor.

Virus ASF menyebar melalui kontak langsung antara hewan (babi) ataupun melalui perantara manusia yang kontak dengan hewan terjangkit. Hingga saat ini belum ada vaksin untuk virus ASF sehingga langkah utama yang harus dilakukan adalah pencegahan. Meskipun virus ASF hanya menjangkit babi, tidak berbahaya bagi manusia, dan tidak mengakibatkan masalah kesehatan masyarakat, namun virus ini dapat bertahan lama dalam tubuh babi, bahkan setelah babi tersebut mati, sehingga akan meningkatkan risiko penyebaran virus. Terlebih lagi, jika melihat sebarannya yang lebih dari satu wilayah dengan jumlah kasus yang cukup besar, maka sebaiknya pemerintah mengambil langkah antisipatif sesegera mungkin sebelum cakupan penyebaran virus ASF meluas dan makin sulit dikendalikan.

Penyebaran virus ASF tentu akan berpengaruh pada pasokan daging babi, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk kebutuhan ekspor ke berbagai negara tujuan. Pemerintah daerah saat ini telah melakukan tindakan pengamanan secara parsial di daerah masing-masing. Tindakan yang diambil bersifat preventif untuk mencegah penyebaran virus ini yaitu dengan memberikan antibiotik dan mengawasi lalu lintas hewan ternak babi. Pihak Karantina Pertanian Tanjung Pinang, salah satunya, telah melaksanakan tindakan serupa dibarengi dengan pengujian untuk semua ternak babi yang akan dilalulintaskan dan juga pengawasan terhadap impor bahan pakan yang masuk ke Pulau Bulan. Sangat disayangkan bahwa pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, justru baru meningkatkan kewaspadaan ketika adanya laporan dari Singapura. Hal tersebut menandakan adanya information gap yang tentunya akan berdampak pada kecepatan pengambilan kebijakan secara nasional. Pemerintah harus segera mengambil langkah tepat dan cepat, tidak hanya sebatas mengatasi information gap saja, tetapi juga pada langkah holistik mencegah masuknya dan menyebarnya virus ASF.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan –sebagai peraturan turunan dari UU 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan– sudah mengatur bagaimana pencegahan penyakit hewan. Lebih lanjut, terkait ASF, Kementerian Pertanian juga sudah mengeluarkan Pedoman Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia ASF yang dapat dijadikan acuan penanganan penyebaran virus ASF.

Pemerintah harusnya sesegera mungkin mencegah penyebaran virus ASF agar tidak menjadi masif seperti kasus penyakit mulut dan kuku (PMK). Mengatasi virus ASF akan lebih sulit dan membutuhkan sumber daya yang lebih besar saat penyebarannya sudah meluas atau bahkan sudah ditetapkan sebagai wabah. Namun, sebelum ditetapkan menjadi wabah oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah sebenarnya dapat segera mengeluarkan peringatan dini atas rekomendasi otoritas veteriner dari wilayahnya. Upaya peringatan dini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum adanya penetapan wabah oleh menteri. Di luar itu, terdapat beberapa aspek yang dibutuhkan untuk menunjangnya, antara lain, dengan meningkatkan kapasitas Badan Karantina yang ada di daerah melalui penyediaan sarana pendukung yang lebih modern dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah-daerah.

Atensi DPR

Adanya komplain dari Singapura atas daging babi yang diimpor dari Indonesia terjangkit ASF menandakan Indonesia belum cukup tanggap dalam menghadapi penyebarluasan virus ASF. DPR RI, dalam hal ini Komisi IV, perlu meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan memastikan mitra kerja terkait melakukan langkah antisipatif yang efektif dan efisien untuk menahan laju penyebaran virus. Pemerintah harus mengoptimalkan kerja karantina di pintu-pintu masuk Indonesia dan antarwilayah di Indonesia hal yang utama. Komisi IV juga perlu mendorong pengembangan teknologi untuk mengatasi berbagai virus yang mengancam hewan ternak. Melalui pelaksanaan fungsi Anggaran, Komisi IV DPR RI dapat memastikan adanya penganggaran yang memadai untuk pencegahan wabah pada hewan ternak, peningkatan kapasitas SDM terkait, dan biaya lain yang ditimbulkan akibat merebaknya suatu wabah.

Sumber

detik.com., 15 Mei 2023;
detikfinance.com., 14 Mei 2023;
kompas.com., 15 Mei 2023;
fao.org., diakses 15 Mei 2023; dan
wahis.woah.org., diakses 15 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.